

***THE REALITY OF TRI HITA KARANA-BASED CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AT THE LUKLUK TRADITIONAL VILLAGE CREDIT INSTITUTION***

**REALITAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERBASIS TRI HITA KARANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT LUKLUK**

**Ni Ketut Utami Dewi<sup>1\*</sup>, I Nyoman Darmayasa<sup>2</sup>, Ni Nengah Lasmini<sup>3</sup>**  
Akuntansi, Politeknik Negeri Bali, Bukit Jimbaran<sup>1,2,3</sup>  
[utamid731@pnb.ac.id<sup>1</sup>](mailto:utamid731@pnb.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research seeks to understand the real conditions of the application of Corporate Social Responsibility (CSR) based on Tri Hita Karana at the Lukluk Customary Village Credit Institution (LPD). This research uses a qualitative descriptive method. The informants of this research were the supervisor, chairman, secretary and employees of LPD Desa Adat Lukluk. This study found that the implementation of Tri Hita Karana local value-based CSR at LPD Desa Adat Lukluk in Bali has brought positive impacts to the economic and social development of the community. The concept of Tri Hita Karana, which includes harmonious relationships between humans and God (Parahyangan), fellow humans (Pawongan), and the environment (Palemahan), is implemented in LPDs through various activities. In the Parahyangan aspect, LPDs contribute to village religious activities, such as donations of punia funds for temples and temple renovation assistance. Meanwhile, in the Pawongan aspect, LPD provides scholarships for employees as well as other social funds to support the community in death ceremonies and youth activities. The Palemahan aspect is realized through the donation of trash cans to increase environmental awareness in the village. The research also highlights the significant role of LPDs in fostering community economic independence through family-based loans that reduce dependence on loan sharks. The LPD's 20% profit sharing for the village community further strengthens the positive relationship between the LPD and the local community. The LPD's continuous social activities not only improve the welfare of the community, but also build a positive image and trust in the LPD. The findings support legitimacy theory and stakeholder theory, which emphasize the importance of companies aligning their social values with societal norms and paying attention to all stakeholders. This research describes CSR in LPDs that contains three aspects of vertical and horizontal harmonization.*

**Keywords:** Corporate Social Responsibility, Village Credit Institution, Reality, Tri Hita Karana

**ABSTRAK**

Penelitian ini berupaya untuk memahami kondisi nyata penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis *Tri Hita Karana* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Lukluk. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini adalah pengawas, ketua, sekretaris dan pegawai LPD Desa Adat Lukluk. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan CSR berbasis nilai lokal *Tri Hita Karana* pada LPD Desa Adat Lukluk di Bali telah membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Konsep *Tri Hita Karana*, yang mencakup hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), sesama manusia (*Pawongan*), dan lingkungan (*Palemahan*), diimplementasikan pada LPD melalui berbagai kegiatan. Dalam aspek *Parahyangan*, LPD berkontribusi pada kegiatan keagamaan desa, seperti sumbangan dana punia untuk pura dan bantuan renovasi pura. Sementara itu, pada aspek *Pawongan*, LPD memberikan beasiswa bagi karyawan serta dana sosial lainnya untuk mendukung masyarakat dalam acara kematian dan kegiatan pemuda. Aspek *Palemahan* diwujudkan melalui donasi tong sampah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di desa. Penelitian ini juga menggarisbawahi peran signifikan LPD dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pinjaman berbasis kekeluargaan yang mengurangi ketergantungan pada rentenir. Adanya pembagian keuntungan LPD sebesar 20% untuk masyarakat desa semakin memperkuat hubungan positif antara LPD dan masyarakat setempat. Aktivitas sosial LPD yang berkesinambungan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun citra positif dan kepercayaan terhadap LPD. Temuan ini mendukung teori legitimasi dan teori *stakeholder*, yang menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan nilai sosial mereka dengan norma masyarakat serta memperhatikan seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini menggambarkan CSR pada LPD yang mengandung tiga aspek harmonisasi vertikal dan horizontal

**Kata Kunci:** Corporate Social Responsibility, Lembaga Perkreditan Desa, Realitas, Tri Hita Karana.

## PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan mengacu pada pengembangan perusahaan yang menyeimbangkan pendekatan Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) dalam hal ini menegaskan bahwa dalam menjalankan bisnis, perusahaan tidak hanya memperhatikan keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat (manusia), dan memainkan peran aktif dalam melindungi lingkungan (*planet*) (Ariastini & Semara, 2019). Salah satu bentuk perusahaan peduli dan berkontribusi terhadap masyarakat (manusia) dan lingkungan (*planet*) yaitu dengan menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

CSR hadir sebagai sebuah konsep yang mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam strategi bisnis perusahaan (Kurnia et al., 2020). CSR merupakan wujud komitmen perusahaan untuk melakukan inisiatif sosial dan lingkungan (Akisik & Gal, 2017). Di Bali, konsep ini menjadi semakin relevan ketika dipadukan dengan filosofi *Tri Hita Karana* yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Bali (Budiastuti, Ni Wayan Novi; Prof. Gede Sri Darma, CFP, 2020).

Konsep CSR telah mengalami evolusi signifikan sejak pertama kali diperkenalkan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 dalam bukunya "*Social Responsibilities of the Businessman*". Teori legitimasi yang dikemukakan oleh Dowling & Pfeffer, (1975) menjadi salah satu landasan teoretis yang menjelaskan bahwa perusahaan perlu menyelaraskan nilai-nilai sosialnya dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini diperkuat oleh teori *stakeholder* Freeman (1984) yang menekankan pentingnya

memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemegang saham. Kegiatan Sosial yang dilakukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengandung nilai sosial ekonomi yang selaras dengan konsep *Tri Hita Karana* (Wedasari & Sukawijaya, 2019). Hal ini diperkuat oleh Carroll (1991) dalam teori piramida CSR-nya menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mencakup aspek ekonomi, hukum, etika, dan filantropi.

Teori ini relevan dengan konsep *Tri Hita Karana* yang juga menekankan keseimbangan berbagai aspek kehidupan. Penelitian (Widiana, 2023) mendemonstrasikan bagaimana LPD yang mengadopsi pendekatan holistik dalam implementasi CSR-nya mencapai tingkat keberlanjutan usaha yang lebih tinggi.

Filosofi *Tri Hita Karana* yang menekankan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), manusia dengan sesama (*Pawongan*), dan manusia dengan lingkungan (*Palemahan*) menjadi landasan fundamental dalam pengembangan program CSR yang berkelanjutan (Made et al., 2023). Konsep THK merupakan konsep nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh, berkembang dalam tradisi harmonisasi masyarakat Bali, dan bahkan kini telah menjadi dasar filosofi bisnis (Bagiada & Darmayasa, 2015; Bandem, 2012; Devi et al., 2020).

Situasi operasional LPD disesuaikan dengan kearifan lokal mencerminkan keinginan pemerintah tidak hanya sekedar memajukan perekonomian tetapi juga melestarikan budaya dan seni (kearifan lokal) di Bali. Penelitian Suryanata (2019) menunjukkan bahwa penerapan *Tri Hita*

*Karana* dalam praktik bisnis di Bali berkontribusi positif terhadap keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

LPD merupakan lembaga keuangan nonbank yang dikelola oleh Desa Pakraman di Bali (Adiputra, 2022; Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017, 2017). LPD menjalankan fungsi intermediasi, menyediakan peluang usaha bagi penduduk desa setempat, menampung tenaga kerja di pedesaan, memperlancar arus pembayaran dan menghilangkan keberadaan rentenir. LPD selama ini berperan besar dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui penyaluran modal yang efektif dan mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan (Merawati & Putra, 2019).

LPD di Bali mengonfirmasi bahwa integrasi nilai-nilai lokal dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat (Putri, I.G.A.M.A.D., & Wirama, 2020). Termasuk salah satunya LPD Desa Adat Lukluk. LPD Desa Adat Lukluk adalah LPD pertama di Bali yang didirikan pada Tahun 1985 dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomer 1A Tahun 1985. Perkembangan dan kemajuan LPD Desa Adat Lukluk terlihat dari Tahun 2015 sampai Tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah aset dan laba. Hal inimenandakan perkembangan LPD Desa Adat Lukluk mengalami perkembangan yang baik. LPD Desa Adat Lukluk, sebagai salah satu lembaga keuangan mikro berbasis desa *pakraman* di Bali, memiliki peran strategis dalam memajukan perekonomian masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Gunawan, K., & Dewi, 2021) mengungkapkan bahwa LPD yang mengimplementasikan program CSR

berbasis kearifan lokal menunjukkan peningkatan kinerja keuangan yang signifikan sekaligus memberikan dampak sosial yang positif.

Program CSR yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Lukluk yang konsisten dilakukan meliputi kegiatan sosial yang meliputi membantu kegiatan upacara keagamaan, dana suka duka orang meninggal, beasiswa kepada karyawan, membantu kegiatan organisasi sekitar (Pemuda Pemuda dan Seka Gong). Kegiatan CSR yang dilakukan LPD Desa Adat Lukluk mencerminkan pengamalan konsep *Tri Hita Karana*. Sejalan dengan temuan tersebut, studi (Adiputra, 2022) membuktikan bahwa penerapan prinsip *Tri Hita Karana* dalam pengelolaan LPD memperkuat ketahanan ekonomi desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

Hubungan LPD dengan masyarakat desa sekitar menimbulkan tanggung jawab ekonomi dan sosial. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi LPD berada di ruang lingkup desa adat. Selain itu, modal yang diperoleh LPD juga berasal dari swadaya masyarakat desa adat sekitar. Sehingga hubungan ini akan menimbulkan kewajiban timbal balik antara LPD dengan masyarakat desa adat (Budhiastuti, Ni Wayan Novi; Prof. Gede Sri Darma, CFP, 2020).

Sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang LPD disertai Keputusan Gubernur Bali menjelaskan bahwa keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan sekitar 20% untuk dana pembangunan desa dan 5% untuk dana sosial, sehingga 25% keuntungan LPD dialokasikan kepada masyarakat sekitar. Sehingga penerapan CSR oleh LPD sudah tertuang sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017 (Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3

Tahun 2017, 2017; Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017, 2017).

Penerapan CSR oleh LPD dengan berbasis kearifan lokal *Tri Hita Karana* terbukti mampu mendorong pembangunan ekonomi di desa-desa adat Bali (Suwitra et al., 2021). Penerapan CSR yang berbasis *Tri Hita Karana* pada LPD Lukluk menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji mengingat potensinya dalam menciptakan model pembangunan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan secara finansial, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi CSR yang dijalankan oleh LPD Lukluk dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian masyarakat dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip *Tri Hita Karana*.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk ke dalam metodologi penelitian kualitatif berupa prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang sedang diamati (Darmayasa & Aneswari, 2015; Kamayanti, 2016). Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, dikarenakan penelitian yang dilakukan ini bersifat holistik (menyeluruh), sarat dengan makna karena berhubungan dengan kenyataan (realita) yang ada di situs penelitian, serta ber asal dari kata-kata ataupun tingkah laku para informan.

Pemilihan situs atau lokasi penelitian merupakan langkah umum yang wajib dilakukan pertama kali oleh para peneliti kualitatif. Tanpa situs atau lokasi yang jelas, penelitian ini mustahil untuk dilakukan. Penelitian ini dilakukan di LPD Desa Adat Lukluk yang merupakan LPD pertama di Bali. Alasan peneliti memilih LPD Desa

Adat Lukluk karena adalah LPD telah mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* dengan berlandaskan nilai budaya *Tri Hita Karana*, meliputi hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), antar manusia (*pawongan*), dan antara manusia dengan lingkungan (*palemahan*).

Etnografi merupakan metode yang memiliki posisi yang cukup penting di antara metode-metode kualitatif dan ilmu sosial (Pertiwi & Ludigdo, 2013). James P. Spradley (2007) memberikan definisi atas etnografi sebagai pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan dengan tujuan utama untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Dalam hal ini, etnografi mengharuskan peneliti melepaskan diri dari bias kultural pribadinya dan mencoba memahami sudut pandang orang lain.

Sejalan dengan pengertian tersebut, maka etnografi digunakan karena penelitian ini ingin mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility* di LPD Desa Adat Lukluk melalui sudut pandang para informan, bukan sudut pandang peneliti. Hal ini dilakukan dengan cara berinteraksi dengan para informan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan utuh (*holistic*) berdasarkan wawancara dengan informan yang sedang memegang posisi sosial dan profesional diantaranya pengawas, kepala, sekretaris, dan nasabah di LPD Desa Adat Lukluk yang telah berkecimpung dan memiliki pengalaman dalam implementasi praktik penerapan CSR dan mampu memberikan pengetahuan budaya kearifan lokal yaitu konsep *Tri Hita Karana* yang diperlukan untuk penelitian ini. Berikut daftar informan, jabatan, dan keterangannya.

**Tabel 2. Daftar Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Made Andi Yuana	Kepala LPD	Menjelaskan terkait sejarah LPD dan kegiatan CSR LPD berbasis Tri Hita Karana (bagian <i>Parahyangan</i> )
2	Luh Gde Swarbawati	Sekretaris LPD	Menjelaskan terkait kegiatan CSR LPD berbasis Tri Hita Karana (bagian Palemahan dan Pawongan)
3	I Made Sugandia.SE	Pengawas LPD	Menjelaskan dampak CSR berbasis Tri Hita Karana dalam memajukan perekonomian Masyarakat Desa Adat Lukluk
4	I Putu Andi Sanjaya	Pegawai sekaligus Masyarakat Desa Adat Lukluk	Pandangan terkait manfaat CSR yang diterima masyarakat Desa Lukluk

Penelitian ini dilakukan pada natural setting (kondisi sesungguhnya di situs penelitian), maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan lebih kepada observasi partisipan (*participant observation*), wawancara, dan dokumentasi (Cresswell & Poth, 2018; Miles et al., 2019; Pertiwi & Ludigdo, 2013). Observasi partisipan dalam penelitian ini dilakukan selama seminggu penuh dengan melibatkan diri secara langsung di dalam pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan *Corporate Social Responsibility* di LPD Desa Adat Lukluk. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Namun, tetap harus memberikan batasan, sehingga isi wawancara yang dilakukan tidaklah jauh menyimpang dari tujuan dan topik yang diharapkan.

Pada proses penelitian ini, peneliti juga menggunakan bahasa Bali (selain bahasa Indonesia) dalam melakukan wawancara dengan para informan. Disamping peneliti berlatarkan budaya Bali, peneliti merasa dengan memakai bahasa Bali akan lebih mempermudah menjalin interaksi dan mendapatkan informasi (data) yang diinginkan. Hasil dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel apabila didukung oleh gambar (foto).

Model dalam proses penelitian ini tidak membedakan proses penelitian ataupun kegiatan pengumpulan datanya terlebih dahulu, tetapi menyatupadukan kegiatan pengumpulan data sampai dengan tahapan analisis data. Proses analisis data dalam penelitian ini sudah dimulai sejak peneliti melakukan observasi di lapangan.

Analisis dilakukan dengan melakukan komunikasi langsung dengan para informan. Selanjutnya, proses lebih lanjut dibagi menjadi tiga

tahapan. Tahap pertama, melakukan reduksi data sebagai proses penyederhanaan data dengan cara mengubah data berupa rekaman (hasil wawancara) menjadi tulisan atau transkrip data, sehingga memudahkan untuk proses analisis selanjutnya. Tahap kedua, melakukan analisis domain berdasarkan atas kemiripan dari data yang telah tereduksi, hasil observasi di lapangan, serta dokumentasi. Selanjutnya adalah melakukan analisis taksonomi yang dilakukan melalui pengamatan dan wawancara mendalam. Analisis komponen dilakukan melalui pengamatan atau wawancara terpilih dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kontras untuk memperoleh gambaran ataupun pengertian yang lebih jelas dan menyeluruh, sehingga membentuk sebuah tema.

Analisis tema merupakan puncak analisis data dalam penelitian ini. Setelah tema terbentuk dilanjutkan dengan melakukan interpretasi data. Tahap ketiga, melakukan interpretasi data sebagai upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan teori yang ada dan kenyataan (informasi) yang diperoleh dari LPD Desa Adat Lukluk. Demi memperoleh kesimpulan yang ideal, maka analisis data dari hasil observasi (pengamatan) dan wawancara yang dilakukan harus memperhatikan tiga hal. Pertama, perhatikan analisis terhadap hasil data melalui observasi yang berkaitan dengan tingkah laku informan, aktivitas CSR yang dilakukan, serta budaya khas di situs penelitian. Kedua, perhatikan data yang di hasilkan dari para informan (pengawas, ketua, dan sekretaris LPD Desa Adat Lukluk), yang terlibat langsung dan memberikan penjelasan tentang masalah yang diteliti, yaitu

implementasi *Corporate Social Responsibility* berbasis *Tri Hita Karana*. Ketiga, perhatikan data yang dihasilkan dari orang awam. Orang awam dimaksudkan dalam penelitian ini adalah para nasabah LPD yang mengetahui atau mendapatkan manfaat dari implementasi *Corporate Social Responsibility* berbasis budaya *Tri Hita Karana* tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

LPD Desa Adat Lukluk didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomer 1A Tahun 1985 pada tanggal 2 Januari 1985, namun pelaksanaan operasionalnya baru dimulai tanggal 7 Maret 1985, adapun potensi Desa Adat Lukluk terdiri dari lima (5) Banjar Adat. LPD Desa Adat Lukluk berlokasi di Jalan Pura Dalem Desa Adat Lukluk, Kecamatan Mengwi Badung Bali.

**Tabel 1. Perkembangan Nilai Aset dan Laba LPD Desa Adat Lukluk dari Tahun 2015 sampai dengan dengan 2023**

Tahun	Aset	Lab
2015	Rp 18.454.223.045	Rp 1.228.512.173
2016	Rp 21.953.077.292	Rp 1.401.127.089
2017	Rp 23.758.406.184	Rp 1.438.932.305
2018	Rp 26.057.793.573	Rp 1.183.883.747
2019	Rp 32.016.428.134	Rp 1.415.030.559
2020	Rp 33.906.558.780	Rp 1.135.940.762
2021	Rp 33.498.712.019	Rp 1.008.699.135
2022	Rp 33.983.376.711	Rp 1.151.946.481
2023	Rp 36.624.838.108	Rp 1.632.775.404

Hingga per 2023 LPD Desa Adat Lukluk memiliki total aset sejumlah Rp 36.624.838.108 dan Laba sebesar Rp 1.632.775.403.



**Gambar 1. Wawancara dengan Kepala LPD Desa Adat Lukluk yang diwakili oleh Sekretaris Desa Adat Lukluk**

Wawancara pertama dilakukan dengan Kepala LPD Desa Adat Lukluk yang diwakili oleh Sekretaris LPD Desa Adat Lukluk yaitu bersama Ibu

Luh Gde Swarbawati. Ketika peneliti menanyakan informasi tentang sejarah LPD Desa Adat Lukluk dan tanggung jawab sosial LPD Desa Adat Lukluk terhadap lingkungan sosial berbasis *Tri Hita Karana* beliau mengungkapkan bahwa LPD Desa Adat Lukluk menerapkan CSR berbasis *Tri Hita Karana*. “LPD Desa Adat Lukluk ini sudah dibentuk dari Tahun 1985, LPD ini pertama di Bali. Mulanya Desa Lukluk memenangkan lomba Desa se-Bali, yang memperoleh juara satu, dua, beserta tiga, dan mendapatkan hadiah pendirian LPD, dari salah LPD Desa Adat Lukluk ini terbentuk. Gagasan pembentukan LPD disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Ida Bagus Mantera selaku Gubernur pada saat itu dan disahkan oleh Bapak Harmoko selaku Menteri Penerangan pada saat itu. Tujuan daripada pembentukan LPD untuk mengurangi rentenir, sehingga

masyarakat desa terbantuan melalui LPD, dan keuntungan di akhir tahun juga akan dibagikan sebesar 20% ke masyarakat, sehingga masyarakat tetap dapat menikmati hasil keuntungan LPD”

Mencermati pandangan informan yang sudah bekerja selama hampir 10 tahun mengantarkan pada suatu simpulan bahwa LPD Desa Adat Lukluk merupakan LPD pertama di Bali yang didirikan pada tahun 1985. Sebenarnya, pendirian LPD ini merupakan suatu hadiah terkait suatu lomba karena Desa Lukluk memenangkan lomba Desa se-Bali. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Gunawan (2018), program pemberian hadiah berupa pendirian LPD merupakan bagian dari strategi pembangunan desa di Bali pada era 1980- an.

Gagasan pembentukan LPD yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantera sebagai Gubernur Bali, sehingga terlihat bahwa peran vital kepemimpinan Gubernur Mantera dalam pengembangan LPD sebagai lembaga keuangan mikro berbasis adat. Tujuan utama LPD untuk mengurangi praktik rentenir dikuatkan oleh simpulan penelitian Putri (2019) yang menyatakan bahwa kehadiran LPD berhasil menurunkan tingkat ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir hingga 60%. Sistem pembagian keuntungan LPD sebesar 20% dibagikan ke masyarakat merupakan bentuk implementasi konsep ekonomi kerakyatan.

Secara filosofis internalisasi nilai lokalitas sudah nampak nyata dari awal pendirian LPD. Sebut saja pembagian 20% laba kepada Masyarakat sebagai suatu penerapan nilai *Catur Purusha Artha* (*Artha, Dharma, Karma, Moksa*) (Darmayasa & Aneswari, 2017; Sukawati, 2023). Lebih operasional

terlihat adanya keberpihakan LPD terhadap keseimbangan hubungan harmonis pencipta, manusia, dan alam. Kita patut berbangga, LPD sudah menerapkan pemikiran nilai keseimbangan yang selanjutnya dikenalkan oleh Elkington dalam konsep *People, Planet, dan Profit*. Lebih lanjut peneliti menggali pandangan dari informan terkait implementasi CSR pada LPD, dengan tegas dan lugas berikut pandangannya:

“LPD Desa Adat Lukluk mempunyai program CSR setiap tahunnya, program CSR ini tentunya menyerap Konsep *Tri Hita Karana*. Kegiatan CSR biasanya meliputi memberikan dana *punia* (sumbangan) ke pura jika ada *odalan* (upacara agama) di setiap pura yang ada di Desa Adat Lukluk. Sumbangan ini sebesar Rp500.000,00 jika piodalan setiap enam bulan sekali dan Rp1.000.000,00 jika *piodalan* setiap satu tahun sekali dan sumbangan renovasi pura jika ada pura di Desa Adat Lukluk yang perlu perbaikan”

Beranjak dari pandangan informan mengenai CSR dapat disimpulkan bahwa LPD Desa Adat Lukluk telah melaksanakan CSR berbasis *Tri Hita Karana* dalam keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*). Bentuk kegiatan berupa dana *punia* (donasi) setiap adanya piodalan (*upacara dewa yadnya*) di seluruh pura-pura yang ada di Desa Lukluk. *Odal* ini biasanya ada yang setiap enam bulan sekali dan satu tahun sekali. Memberikan bantuan sumbangan jika ada renovasi Pura, LPD juga turut serta memberikan sumbangan jika ada Perbaikan atau renovasi pura-pura di seluruh banjar dinas lukluk. Kontribusi lembaga keuangan pada kegiatan keagamaan merupakan bentuk implementasi tanggungjawab sosial yang penting (Dewi, 2018). Kegiatan

Sosial yang dilakukan LPD mengandung nilai sosial ekonomi yang selaras dengan konsep *Tri Hita Karana* (Wedasari & Sukawijaya, 2019). Hal ini diperkuat oleh Carroll (1991) dalam teori piramida CSR-nya menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mencakup aspek ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Teori ini relevan dengan konsep *Tri Hita Karana* yang juga menekankan keseimbangan berbagai aspek kehidupan. Penelitian Widiana (2023) mendemonstrasikan bagaimana LPD yang mengadopsi pendekatan holistik dalam implementasi CSR-nya mencapai tingkat keberlanjutan usaha yang lebih tinggi.



**Gambar 2. Wawancara dengan Sekretaris LPD Desa Adat Lukluk**

Wawancara tetap dilanjutkan dengan Sekretaris LPD Desa Adat Lukluk untuk memperoleh gambaran mengenai CSR berbasis *Tri Hita Karana* terutama bagian *palemahan* dan *pawongan*.

“Kegiatan CSR yang dilakukan LPD berbasis pawongan atau hubungan harmonis antara manusia dengan manusia yang pertama LPD memberikan bantuan beasiswa bagi karyawan dan kedua LPD, memberikan dana suka duka orang meninggal, dan membantu Seka Teruna Teruni (Perkumpulan Pemuda dan Pemuda Desa)”

Mengacu pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia (*Pawongan*) dalam bentuk kegiatan berupa beasiswa kepada karyawan LPD untuk melanjutkan ke

jenjang perkuliahan. Beasiswa ini diberikan agar Sumber Daya Manusia (SDM) LPD semakin baik, standar lulusan dan kompetensi SDM LPD juga sejalan dengan pekerjaan yang dilakukan di LPD. Memberikan dana suka duka orang meninggal. Dana suka duka ini diberikan bagi setiap orang yang meninggal di Desa Adat Lukluk, biaya ini sangat membantu masyarakat karena sistem dan upacara kematian di Desa Adat Lukluk langsung sampai upacara pengabenan. LPD juga membantu organisasi pemuda dan pemudi dalam berbagai kegiatan dan even untuk mendukung keaktifan pemuda pemudi di Desa Adat Lukluk, contohnya dalam menyumbang pembuatan *ogoh-ogoh*, memberikan dana untuk mengikuti lomba pekan olahraga antar desa, HUT Organisasi pemuda dan pemudi.

“Kegiatan CSR yang dilakukan LPD berbasis *palemahan* atau hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan berupa pemberian tong sampah”

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan (*Palemahan*) dilakukan dalam bentuk kegiatan pemberian sumbangan berupa tong sampah ke banjar dinas masing-masing Desa Adat Lukluk, sehingga pengurus di masing-masing banjar dinas juga sadar dan menginisiasi dalam menjaga lingkungan seperti pada saat *piodalan* di pura.



### **Gambar 3. Wawancara dengan Pengawas LPD Desa Adat Lukluk**

Wawancara ketiga dilakukan dengan Pengawas LPD Desa Adat Lukluk yaitu Bapak I Made Sugandia, peneliti menekankan pada poin dampak CSR berbasis *Tri Hita Karana* dalam memajukan perekonomian Masyarakat Desa Adat Lukluk.

“Keberadaan LPD sangat dirasakan manfaatnya oleh Desa, tentunya berkaitan dengan tujuan dibentuknya LPD oleh Gubernur Bali Bapak Mantra pada saat itu, 20% keuntungan LPD harus dibagikan kembali ke Desa sehingga dirasakan langsung oleh masyarakat. Disamping itu, untuk mengurangi rentenir karena peminjaman di LPD dilakukan dengan asas-asas kekeluargaan, sehingga perekonomian masyarakat juga meningkat seiring perkembangan LPD yang meningkat. Selain dana keuntungan 20% tersebut, aktivitas-aktivitas sosial juga memberikan dampak yang sangat baik kepada masyarakat. Contohnya saja Pemuda Pemudi yang melakukan kegiatan, selalu membawa proposal ke LPD, kami di LPD selalu membantu memberikan dana untuk mendukung aktivitas positif. Belum lagi apabila ada kematian, LPD selalu memberikan bantuan untuk meringankan beban upacara, karena di Lukluk itu sistemnya langsung *pengabenan*. Dana Pembangunan pura juga kami di LPD ikut menyumbangkan sehingga masyarakat betul-betul merasakan keberadaan LPD dan manfaat LPD. Aktivitas CSR tersebut secara tidak langsung membuat masyarakat percaya kepada LPD dan citra LPD dipandang sangat baik oleh masyarakat”.

Lebih lanjut memahami penjelasan informan dapat disimpulkan bahwa keberadaan LPD terbukti memberikan manfaat yang berdampak

bagi masyarakat desa, sesuai dengan tujuan pembentukan awalnya. Hal ini selaras dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa LPD berperan penting dalam memajukan perekonomian desa melalui pengelolaan keuangan berbasis kearifan lokal (Darmayasa, 2024; Darmayasa et al., 2023; Putra, I. M., & Sujana, 2016). Salah satu aspek utama dari tujuan ini adalah bahwa 20% dari keuntungan LPD harus disalurkan kembali ke desa, yang memungkinkan masyarakat merasakan langsung manfaat dari keberadaan LPD (Sudarma & Wirakusuma, 2006).

Selain itu, salah satu alasan utama keberadaan LPD adalah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada rentenir. Menurut penelitian oleh Ardika dan Bawa (2017), pinjaman yang diberikan LPD berdasarkan asas kekeluargaan dan keterjangkauan suku bunga membantu mendorong kemandirian finansial dan mengurangi ketergantungan pada rentenir. Hal ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa secara keseluruhan.

Tidak hanya dalam aspek *finansial*, aktivitas sosial LPD juga memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat desa. Menurut Gede (2018), keterlibatan LPD dalam berbagai kegiatan sosial, seperti mendukung kegiatan pemuda dan memberikan bantuan untuk upacara kematian, memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Dukungan ini juga mencakup kontribusi terhadap pembangunan pura dan fasilitas umum lainnya, yang juga memperkuat hubungan antara LPD dan masyarakat (Bagiada & Darmayasa, 2015; Yasa, I. M., & Sudibia, 2015).

Kegiatan sosial LPD yang berkelanjutan, termasuk aktivitas CSR,

secara tidak langsung membangun citra positif LPD dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Penelitian oleh Utama dan Putri (2019) menunjukkan bahwa aktivitas sosial dan CSR yang dijalankan LPD memiliki korelasi positif dengan tingkat kepercayaan masyarakat, yang berdampak pada peningkatan loyalitas dan dukungan masyarakat terhadap LPD. Temuan ini juga mendukung teori legitimasi dan *stakeholder*. Teori legitimasi yang dikemukakan oleh Dowling dan (Pfeffer, 1975) menjadi salah satu landasan teoretis yang menjelaskan bahwa perusahaan perlu menyelaraskan nilai-nilai sosialnya dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini diperkuat oleh teori *stakeholder* Freeman (1984) yang menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemegang saham, melainkan juga *stakeholder* pelanggan yang dalam hal ini nasabah sekaligus masyarakat LPD Desa Adat Lukluk.



**Gambar 4. Wawancara dengan Pegawai LPD Desa Adat Lukluk sekaligus Masyarakat Desa Adat Lukluk**

Wawancara terakhir dilakukan dengan Nasabah sekaligus Masyarakat Desa Adat Lukluk. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pandangan terkait manfaat CSR yang diterima nasabah sekaligus masyarakat Desa Lukluk.

“Sumbangan yang diberikan oleh LPD sangat membantu masyarakat terutama beasiswa kepada pegawai yang mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lebih baik karena”

Mengacu pada penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa LPD berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia melalui program beasiswa yang diberikan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program ini tidak hanya membantu secara *finansial* tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat secara keseluruhan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Dharma (2020) yang membuktikan bahwa program beasiswa yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro seperti LPD memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai dan produktivitas kerja.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa penerapan CSR berbasis nilai lokal *Tri Hita Karana* THK pada LPD Desa Adat Lukluk mengantarkan pada dampak yang positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Konsep THK, yang mencakup hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), sesama manusia (*Pawongan*), dan lingkungan (*Palemahan*), tidak sebatas nilai pajangan, namun sudah terimplementasi pada LPD Lukluk melalui berbagai kegiatan. Pada aspek *Parahyangan*, LPD Lukluk berkontribusi pada kegiatan keagamaan desa, seperti sumbangan *dana punia* untuk pura dan bantuan renovasi pura. Sementara itu, pada aspek *Pawongan*,

LPD berinvestasi jangka panjang teruntuk karyawan serta dana sosial lainnya untuk meringankan beban masyarakat dalam acara kematian dan kegiatan pemuda. Aspek *Palemahan* diwujudkan melalui donasi tong sampah untuk meningkatkan kesadaran kepedulian terhadap lingkungan yang asri dan alami.

Penelitian ini juga menggarisbawahi peran signifikan LPD dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pinjaman berbasis kekeluargaan yang mengurangi ketergantungan pada rentenir. Adanya pembagian keuntungan LPD sebesar 20% untuk masyarakat desa semakin memperkuat hubungan positif antara lembaga dan masyarakat setempat. Aktivitas sosial LPD yang berkesinambungan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun citra baik dan memupuk kepercayaan pada LPD. Simpulan ini sejalan dengan teori legitimasi dan teori *stakeholder*, yang menekankan pentingnya entitas dalam hal ini LPD menjaga nilai sosial mereka dengan norma masyarakat serta memperhatikan seluruh pemangku kepentingan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P. (2022). Implementasi Tri Hita Karana dalam Pengelolaan LPD: Studi Kasus pada LPD di Kabupaten Badung. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 142–159.
- Ardika, I., & Bawa, I. (2017). Pengaruh LPD terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Ekonomi Desa*, 15(2), 134–148.
- Bagiada, I. M., & Darmayasa, I. N. (2015). Implementasi Filosofi Tri Hita Karana Dalam Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi IV*, 798– 815.
- Bandem, P. D. (2012). *Tri Hita Karana Dan Tat Twam Asi Sebagai Konsep Keharmonisan Dan Kerukunan*.
- Budiastuti, Ni Wayan Novi; Prof. Gede Sri Darma, CFP, D. B. A. (2020). *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali (Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa)*.
- Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48.
- Cresswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. Sage Publications Inc. USA. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>
- Darmayasa, I. N. (2024). Understanding Digital Transformation Village Credit Institutions Towards Sustainability Based on Local Genius. 1. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jiab.v8i2.5237>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(5), 350–361. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6028>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2017). Catur Purusa Artha Lensa Dekonstruksi Definisi Pajak Yang Berkeadilan. *EQUITY: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 20(2), 1–16.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.34209/equ.v20i2.618>
- Darmayasa, I. N., Parnata, I. K., & Setyastrini, N. L. P. (2023). Implementasi ISAK 35 pada Lembaga Perkreditan Desa. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 14(2), 143-160. <https://doi.org/10.18860/em.v14i2.20514>
- Dewi, S., Masdiantini, P. R., Dewi, P. E. D. M., & Diputra, I. B. R. P. (2020). *E-Link Service Synergity, Perceived Risk Management, and Tri Hita Karana in LPD in Driving Financial Inclusion*. 158(Teams), 239–246. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201212.033>
- Dewi, N. K. A. (2018). Implementasi Corporate Social Responsibility Berbasis Kearifan Lokal pada Lembaga Keuangan Mikro di Bali. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(3), 112–127.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Eka Putri, N. M. D. (2019). Peran LPD dalam Pengentasan Praktik Rentenir di Bali: Studi Kasus di Kabupaten Badung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 78–92.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Publishing Inc.
- Gede, A. W. (2018). Peran LPD dalam Kegiatan Sosial dan Pengembangan Masyarakat. *Jurnal Sosial Budaya*, 8(1), 90–101.
- Gunawan, K., & Dewi, N. P. S. (2021). Pengaruh Program CSR Berbasis Kearifan Lokal terhadap Kinerja Keuangan dan Dampak Sosial LPD di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 45–62.
- Gunawan, K. (2018). Perkembangan LPD sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Adat di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 8(1), 35–52.
- James P. Spradley. (2007). *Metode Etnografi (II)*. Tiara Wacana.
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Konstruktif Riset Akuntansi Membumikan Religiositas*. Yayasan Rumah Peneleh.
- Kurnia, A., Shaura, A., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2020). Sustainable Development Dan Csr. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 231. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26211>
- Made, I., Noval, M., Oka, A. A. N., Gorda, S., Ningsih, L. K., Tinggi, S., Ekonomi, I., Dharma, S., & Nasional, U. P. (2023). Implementation Of Corporate Social Responsibility Based On Tri Hita Karana In Maximizing Organizational Performance In LPD In Buleleng Regency Implementasi Corporate Social Responsibility Berbasis Tri Hita Karana Dalam Memaksimalkan Kinerja Organisasi Di . *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(3), 3132–3142.
- Merawati, L. K., & Putra, I. G. C. (2019). Enhancing Lpd Performance To Strengthening the Rural Economy. *Proceeding - The 9th International Conference of Rural Research and Planning Group*, 273–278.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications Inc. USA. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017. (2017). *Lembaga Perkreditan Desa*. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017. (2017). *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa*. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- Pertiwi, I. D. A. E., & Ludigdo, U. (2013). Implementasi Corporate Social Responsibility Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 430–455.
- Putra, I. M., & Sujana, I. W. (2016). LPD sebagai Pilar Ekonomi Desa: Studi Kasus di Bali. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 55–70.
- Putra Suryanata, I. G. N. (2019). Sinergisitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Membangun Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 16(1), 206. <https://doi.org/10.38043/jmb.v16i1.2028>
- Putri, I.G.A.M.A.D., & Wirama, D. G. (2020). Pengaruh Penerapan Nilai-nilai Lokal pada Pengelolaan LPD terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 266–280.
- Putri, N. K., & Dharma, I. G. (2020). Efektivitas Program Beasiswa Lembaga Keuangan Mikro terhadap Peningkatan Kualitas SDM di Bali. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 78–92.
- Sudarma, M., & Wirakusuma, I. G. (2006). Implementasi Corporate Social Responsibility di LPD dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 32–41.
- Sukawati. (2023). *Catur Purusa Artha sebagai Dasar Budaya Kerja di LPD Bali: Implikasi pada Lingkungan Pengendalian dan Kinerja Pegawai*. Gramedia.
- Sutama, I. W., & Putri, A. P. (2019). Pengaruh Aktivitas Sosial LPD terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Lokal*. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 12(3), 210–225.
- Suwitra, I. M., Selamat, I. K., & Datrini, L. K. (2021). Penguatan Kapasitas Lpd Desa Adat Di Bali Melalui Penyuratan Awig-Awig. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 676. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2762>
- Wedasari, D., & Sukawijaya, I. G. N. K. (2019). LPD Performance in Gianyar Regency: an Analysis of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Implementation. *International Journal of Sustainability, Education, and Global Creative Economic (IJSEGCE)*, 2(3), 135–140.
- Widiana, I. N. M. (2023). Pendekatan Holistik dalam Implementasi CSR: Studi pada LPD di Provinsi Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 78–93.
- Yasa, I. M., & Sudibia, K. (2015). LPD dan Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Bali. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 7(4), 44–59